BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dari kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti apa yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 dikatakan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹Perkawinan menurut Undang-undang ini bukan hanya sebagai suatu kontrak keperdataan biasa, namun juga mempunyai nilai ibadah, selain itu suatu perkawinan sangat erat sekali hubungannya dengan agama yang dianut seseorang, terutama dengan keabsahan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Selanjutnya pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

¹Undang-undang No 1 Tahun 1974

Pencatatan Perkawinan dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Yang diangkat oleh Menteri Agama Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang No 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama islam dan wilayahnya.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak awal Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum tersebut adalah bahwa segala hubungan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus dalam dan didasarkan pada norma hukum yang berlaku khususnya pelaksanaan perkawinan tidak terkecuali perkawinan apapun dan dilakukan oleh siapapun. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan ketentuan pada hukum.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Diatas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak. Sebab perkawinan semacam inilah yang bisa di harapkan memiliki nilai *transcendental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at islam.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan para pihak yang melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.² Namun demikian penyimpangan atau pengecualian terhadap batas usia sebagaimana diatur dalam perundang-undang tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi atau ijin yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Undang-undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Melihat bunyi ketentuan tersebut secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompoten. Pernikahan dibawah umur menjadi sebuah kegiatan yang dilarang oleh undang-undang, karena menyangkut hak asasi manusia seseorang. Fakta yang tak terbantakan bahwa pernikahan anak dibawah umur terus dibayangi

²Ketentuan Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kontroversi mengenai dilematis dua hak asasi manusia yaitu hak asasi pernikahan/perkawinan dan hak asasi perlindungan anak yang keduanya dihadapkan pada suatu perdebatan sengit terkait dengan hak asasi manakah yang diprioritaskan lebih dulu. Hal ini mengingat kedua hak asasi tersebut sama-sama penting bagi seseorang yang berkehendak untuk menuntut akan pemenuhan hak asasi atas kepentingan pribadinya.

Fenomena munculnya perkawinan dibawah umur dapat dikatakan merupakan tamparan bagi pembuat hukum. Hal ini disebabkan praktek perkawinan dibawah umur mengindikasikan bahwa hukum perkawinan nyaris seperti hukum yang tidak bertaring karena terjadi pelanggaran hukum perkawinan. Kondisi dan situasi demikian tidak terlepas dari eksistensi dan konsistensi berlakunya undang-undang perkawinan maupun komplikasi hukum islam tidak memuat sanksi yang berat yang dapat dikenakan terhadap perbuatan perkawinan dibawah umur.

Data yang diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur yang melibatkan beberapa warga masyarakat Kecamatan Batudaa merupakan salah satu angka tertinggi yang ada diwilayah Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah memperoleh data awal tentang perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Batudaa sejak 3 Tahun terakhir yakni dari tahun 2013 s/d 2015 dimana telah terjadi perkawinan

dibawah umur yang dilakukan oleh 22 pasangan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan mengangkat topik penulis yakni “Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menangani Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Di KUA Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo”.³ Hal ini perlu dilakukan penelitian mengingat ada sebagian pendapat ulama islam yang berkembang yang menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur sebenarnya tidak dilarang. Berkenan dengan hal itu, maka penulis mencoba melakukan penelitian hukum terhadap fenomena perkawinan dibawah umur tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menangani Perkawinan Dibawah Umur Di KUA Kec. Batudaa Kab. Gorontalo?
- 1.2.2 Apa Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Di Kec. Batudaa Kab. Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini tidak lain sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam menangani Perkawinan Dibawah Umur Di KUA Kec. Batudaa Kab. Gorontalo.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Lebih Jelas Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Di Kec. Batudaa Kab. Gorontalo..

³Wawancara dengan Serli Halim Lomban “Pegawai KUA Kec. Batudaa” tanggal 8 januari 2016

1.4 Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dari penelitian ini terdiri dari:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum perdata, serta menambah wawasan khususnya terkait peran pegawai pencatat nikah dalam menangani masalah perkawinan di bawah umur.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

sebagai bahan masukan bagi semua pihak khususnya pemerintah Gorontalo agar dapat memperhatikan peran pegawai pencatat nikah dalam menangani masalah perkawinan di bawah umur. Sementara bagi masyarakat sebagai informasi tentang penerapan hukum terhadap perkawinan di bawah umur.